



ANALISIS POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT TAHUN 2017 - 2019

Oleh

Musniasih Yuniati¹⁾ & Ihsan²⁾

^{1,2}Universitas Nahdatul Wathan Mataram

Email: ¹musniasih.v@gmail.com & ²ihsannisan949@gmail.com

Abstrak

Sumber daya manusia merupakan seluruh kemampuan atau potensi penduduk yang berada dalam suatu wilayah beserta ciri demografi sosial dan ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan. Sumber daya manusia dapat menjadi kekuatan yang istimewa dan berfungsi sebagai input kerja sehingga potensi sumber daya manusia dapat diidentifikasi sebagai penduduk dan tenaga kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi sumber daya manusia yang terdiri dari jumlah penduduk dan jumlah tenaga kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017 - 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan jumlah penduduk dan jumlah tenaga kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017 - 2019 mengalami peningkatan. Jumlah angkatan kerja lebih besar dari jumlah bukan angkatan kerja dalam periode tahun yang sama.

Kata Kunci: Potensi & Sumber Daya Manusia

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang sangat berperan dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Peran penting sumber daya manusia adalah sebagai perencana pelaksana dan sebagai konsumen dalam proses produksi barang dan jasa. Kegiatan produksi barang dan jasa merupakan salah satu unsur penentu pergerakan kegiatan ekonomi suatu daerah.

Menurut Sonny Sumarsono (2013) sumber daya manusia berkaitan dengan manusia yang bisa bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja. Mampu bekerja bisa diartikan mampu melakukan segala kegiatan yang memiliki kegiatan ekonomi. Orang yang mampu melakukan kegiatan ekonomi adalah manusia yang masuk dalam kelompok penduduk dan tenaga kerja.

Penduduk dan tenaga kerja merupakan dua komponen yang tidak lepas dari berbagai permasalahan terutama jika dikaitkan dengan kegiatan pembangunan ekonomi suatu daerah.

Masalah utama yang sering muncul berkaitan masalah penduduk dan tenaga kerja adalah kualitas sumber daya manusia yang masih

rendah hal ini akan berpengaruh pada produktivitas tenaga kerja yang juga rendah selanjutnya hal ini akan berkaitan dengan rendahnya tingkat upah yang diterima tenaga kerja. Jika upah yang diterima tenaga kerja rendah maka daya beli tenaga kerja akan rendah pula hal ini akan berpengaruh pada produksi barang dan jasa. Jika produksi barang dan jasa rendah maka kegiatan ekonomi suatu daerah akan terganggu,

Untuk mengatasi masalah penduduk dan tenaga kerja pemerintah harus membuat perencanaan yang matang pada dua komponen tersebut dengan mengenali potensi pada dua komponen tersebut.

LANDASAN TEORI

Pengertian Sumber Daya Manusia

Menurut Nawawi (2000:47) konsep sumber daya manusia memiliki tiga pengertian yaitu:

1. Sumber daya manusia adalah personil, tenaga kerja, karyawan yang bekerja dilingkungan organisasi.
2. Sumber daya manusia adalah potensi manusia sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.



3. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non material didalam organisasi bisnis yang diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Pengertian sumber daya manusia secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja baik yang sudah memperoleh pekerjaan maupun yang belum memperoleh pekerjaan. Sumber daya manusia secara makro berarti juga penduduk yang berada dalam usia produktif meskipun karena berbagai sebab dan masalah belum memasuki lapangan kerja.

Pengertian sumber daya manusia secara mikro adalah manusia atau orang yang bekerja menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain-lain.

Klasifikasi sumber daya manusia, yaitu sebagai berikut:

A. Tenaga kerja (Manpower)

Adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15 – 64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

Tenaga kerja dibagi 3 yaitu:

1. Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan yang tidak bekerja tetapi siap untuk mencari pekerjaan.
2. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih bersekolah, ibu rumah tangga, penyandang cacat, dan lanjut usia.
3. Penduduk yang bekerja digolongkan menjadi dua yakni:
 - a. Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan atau bekerja dengan maksud memperoleh penghasilan

atau keuntungan selama seminggu.

- b. Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari satu jam.

B. Pengangguran (Unemployment)

Adalah mereka yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan.

Ada beberapa jenis pengangguran yaitu:

1. Pengangguran terbuka yaitu mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan.
2. Pengangguran terselubung yaitu mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu.
3. Pengangguran tidak kentara yaitu jika seseorang bekerja secara penuh tetapi pekerjaannya dianggap tidak mencukupi karena pendapatannya terlalu rendah.
4. Pengangguran friksional yaitu pengangguran yang terjadi akibat pindahnya seseorang dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain.
5. Pengangguran structural yaitu pengangguran yang disebabkan karena ketidakcocokan antara struktur para pencari kerja dengan keterampilan, bidang keahlian maupun daerah lokasinya dengan struktur permintaan tenaga kerja yang belum terisi.

Peran dan fungsi sumber daya manusia secara ekonomi:

1. Sumber daya manusia sebagai faktor produksi.
2. Sumber daya manusia sebagai proses produksi.

Peran sumber daya manusia dalam pembangunan:

1. Sebagai tenaga kerja.
2. Sebagai tenaga ahli.
3. Sebagai pemimpin perusahaan.
4. Sebagai tenaga usahawan.
5. Sebagai produsen.



6. Sebagai konsumen.

Teori ekonomi sumber daya manusia:

1. Teori klasik Adam Smith
Menganggap bahwa manusia berperan sebagai faktor produksi yang berfungsi menentukan kemakmuran bangsa.
2. Teori klasik J.B.Say
Mengatakan bahwa manusia sebagai keluarga perusahaan yang berfungsi memproduksi output.
3. Teori Malthus
Mengatakan bahwa manusia berperan sebagai konsumen sehingga menurut Malthus perlu diadakan penundaan perkawinan dalam rangka mengurangi pertumbuhan penduduk.
4. Teori Keynes
Mengatakan bahwa manusia sebagai tenaga kerja yang berfungsi menghasilkan produktivitas.
5. Teori Harrod-Domar
Mengatakan bahwa manusia sebagai investasi yang berfungsi menciptakan permintaan dan kapasitas produksi.
6. Teori Coaler-hoover
Berpendapat manusia berperan sebagai input proses produksi sehingga berfungsi menghasilkan output yang lebih besar.
7. Teori Ester Boserup
Mengatakan bahwa manusia berperan sebagai pengganggu pembangunan yang mengakibatkan perubahan di sistem pertanian.
8. Teori Rational Ekspektation
Mengatakan bahwa manusia sebagai aspek ketenagakerjaan sehingga output dan employment seimbang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang <http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>
Open Journal Systems

mendeskrripsikan potensi sumber daya manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017 – 2019. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data proyeksi penduduk NTB tahun 2017 – 2019 dan data keadaan ketenagakerjaan ntb 2 agustus 2019. Analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan data kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penduduk dan tenaga kerja merupakan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi suatu daerah.

Penduduk sebagai bagian dari sumber daya manusia mempunyai peran ganda dalam kegiatan ekonomi. Dalam konteks pasar penduduk berperan sebagai produsen dan konsumen barang dan jasa. Dari sisi penawaran penduduk berperan sebagai produsen barang dan jasa hal ini dilakukan penduduk jika ia adalah seorang pengusaha atau pedagang atau tenaga kerja sedangkan dari segi permintaan penduduk berperan sebagai konsumen barang dan jasa yang dihasilkan produsen. Hal ini sesuai dengan pernyataan Irawan (2002.286) yang menyatakan dari segi permintaan penduduk bertindak sebagai konsumen dan dari segi penawaran bertindak sebagai produsen. Dalam kenyataannya tidak semua penduduk berperan sebagai produsen dan konsumen barang dan jasa.

Di sisi konsumsi penduduk dapat berperan sebagai konsumen jika ia mempunyai daya beli yang mencukupi tingkat konsumsinya. Sedangkan dari sisi produksi penawaran akan responsif jika produsen atau sumber daya manusia memiliki kapasitas produksi yang memadai dan efisien.

Secara teoritis penambahan jumlah penduduk membawa dua dampak bagi pembangunan ekonomi yaitu dapat menciptakan atau meningkatkan permintaan baru dan dapat menyebabkan diseconomies of scale.

Data tentang kependudukan provinsi nusa tenggara barat dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Proyeksi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2017-2019



| Jenis Kelamin | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 |
|---------------|------------|------------|------------|
| Laki-laki | 2.405.080 | 2.461.652 | 2.488.813 |
| Perempuan | 2.550.498 | 2.579.956 | 2.608.733 |
| Jumlah | 4.955.578 | 5.013.687 | 5.070.385 |

Sumber: BPS Proyeksi Penduduk Kabupaten Kota Provinsi NTB Tahun 2010-2020

Berdasarkan data pada tabel 1 tampak jumlah penduduk Provinsi NTB di proyeksikan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah penduduk dapat dianalisa dari berbagai sudut pandang. Secara garis besar ada dua sudut pandang yang ekstrem dari para ahli tentang efek dari peningkatan jumlah penduduk terhadap pembangunan. Menurut M.L.Jhingan (2010.2510) pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan tekanan pada lahan dan menyebabkan pengangguran. Pertumbuhan penduduk semakin menekan pendapatan perkapita, menurunkan standar kehidupan dan menurunkan pembentukan modal. M.L.Jhingan merupakan ahli yang pesimis terhadap peningkatan jumlah penduduk. Sedangkan Profesor A.Hansen berpandangan positif terhadap peningkatan jumlah penduduk. Menurut Profesor A.Hansen dalam teori seculer stagnation menyatakan bertambahnya jumlah penduduk akan menciptakan atau memperbesar permintaan agresif terutama investasi.

Tujuan dari investasi itu sendiri terutama bagi negara dunia ketiga (NSB) adalah untuk meningkatkan output. Biasanya incremental capital output ratio (ICOR) untuk negara dunia ketiga berkisar diantara tiga sampai empat artinya adalah setiap satu unit kenaikan output dibutuhkan kenaikan capital sebanyak tiga hingga empat unit. Oleh karena itu untuk mempertahankan standar hidup paling tidak pada tingkat sekarang maka negara dunia ketiga harus mampu menabung sebesar 9 sampai 12 % dari penghasilan nasional dalam setahun dan kemudian menginvestasikannya Kembali. Namun hal itu tidak semudah yang diucapkan (Suparmoko 2002.295) dengan demikian apakah

Vol.15 No.1 Agustus 2020

penduduk merupakan pemacu atau penghambat pembangunan tidak tergantung pada jumlah penduduk namun tergantung pada kapasitas penduduk itu dalam pembangunan.

Peningkatan jumlah penduduk di Provinsi NTB akan berdampak positif bagi pembangunan apabila kapital dan kemampuan managerial organisasi dan administrasi dapat mengimbangi kenaikan jumlah penduduk. Disamping itu peningkatan jumlah penduduk akan berdampak positif bila jumlah penduduk dapat menghasilkan tingkat upah real perkapita yang maksimum.

Menurut Payaman Simanjuntak penduduk terdiri dari tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai bagian dari penduduk memegang peranan yang sangat penting terutama jika dikaitkan dengan produksi barang dan jasa. Menurut UU Nomor 13 Tahun 2013 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 tenaga kerja yakni setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Jumlah tenaga kerja jika dikaitkan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 menunjukkan jumlah orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa. Dengan demikian tenaga kerja merupakan potensi yang harus diperhitungkan dalam pembangunan ekonomi suatu daerah.

Data tentang potensi ketenagakerjaan di Provinsi NTB dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama, Agustus 2017-2019

| Status Keadaan Ketenagakerjaan | Agu stus 2017 | Agu stus 2018 | Agu stus 2019 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | Ribu Oran g | Ribu Oran g | Ribu oran g |
| Penduduk Usia Kerja | 3.49 8,40 | 3.39 4,44 | 3.60 0,43 |
| Angkatan Kerja | 2.39 6,17 | 2.23 7,38 | 2.47 1,55 |



| | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Bekerja | 2,31 6,72 | 2,15 4,12 | 2,38 7,04 |
| Pengangguran | 79,4 5 | 83,2 6 | 84,5 2 |
| Bukan Angkatan Kerja | 1,10 2,23 | 1,15 7,06 | 1,12 8,88 |
| Sekolah | 273, 34 | 234, 98 | 289, 99 |
| Mengurus Rumah Tangga | 695, 31 | 742, 15 | 682, 30 |
| Lainnya | 113, 58 | 179, 93 | 156, 59 |

Sumber: BPS Keadaan

Ketenagakerjaan NTB Agustus 2019

Berdasarkan Tabel 2 diatas tampak jumlah penduduk usia kerja menunjukkan jumlah yang fluktuatif antara tahun 2017-2019. Dari kisaran waktu tersebut pada tahun 2019 jumlah penduduk usia kerja meningkat secara signifikan dari dua tahun sebelumnya. Ini berarti jumlah penduduk yang siap masuk dalam dunia kerja mengalami peningkatan.

Penduduk usia kerja secara konseptual diklasifikasikan sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja (Manpower) adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15 – 64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.

Berdasarkan pengertian tenaga kerja maka peningkatan jumlah penduduk usia kerja secara otomatis akan menunjukkan jumlah tenaga kerja yang dapat memproduksi barang dan jasa dalam suatu daerah.

Produksi barang dan jasa dalam suatu daerah akan memiliki kualitas baik jika diproduksi dan dikerjakan oleh tenaga kerja yang berkualitas. Tenaga kerja yang berkualitas dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja. Semakin terdidik dan terampil tenaga kerja semakin baik kualitas barang dan jasa yang dihasilkan. Analisa

tersebut sesuai dengan pernyataan Myier dan Raucha (2001:2016) yang menyatakan pekerja yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi akan mampu merespon inovasi yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tenaga kerja selanjutnya dibagi menjadi Angkatan kerja yaitu penduduk yang bekerja dan yang tidak bekerja tetapi siap untuk mencari pekerjaan.

Data angkatan kerja di Provinsi NTB tahun 2017 – 2019 menunjukkan rasio jumlah penduduk yang bekerja lebih besar dari jumlah penduduk yang menganggur. Ini berarti pemerintah daerah telah mampu membuka lapangan kerja yang sesuai dengan keterampilan tenaga kerja.

Namun jika dilihat dari jumlah penduduk yang menganggur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hal ini dimungkinkan terjadi karena sistem informasi dalam pasar kerja yang tidak sempurna sehingga pengangguran di negara mana pun tidak akan pernah zero atau nol.

Disamping angkatan kerja tenaga kerja juga dibagi bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-undang tenaga kerja nomor 13 tahun 2003 mereka adalah penduduk diluar usia yakni mereka yang berusia dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahun.

Data bukan angkatan kerja Provinsi NTB Tahun 2017-2019 menunjukkan jumlah yang fluktuatif. Bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bersekolah mengurus rumah tangga dan lainnya. Diantara tiga komponen tersebut jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga menunjukkan jumlah yang terbanyak ini berarti penyediaan tenaga kerja perempuan menjadi kecil hal ini disebabkan mereka lebih memilih mengurus rumah tangga daripada menjadi tenaga kerja. Namun dalam kondisi nyata banyak ibu-ibu rumah tangga yang bekerja sambil mengurus rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Jika dibandingkan antara angkatan kerja dan bukan angkatan kerja untuk Provinsi NTB



tahun 2017-2019 menunjukkan jumlah Angkatan kerja lebih banyak daripada bukan angkatan kerja. Sebagai konsekuensi logis dari hal tersebut pemerintah harus menyediakan lapangan kerja dalam jumlah banyak karena jika peningkatan angkatan kerja tidak diimbangi dengan bertambahnya lapangan kerja akan menyebabkan terjadinya pengangguran. Penduduk yang menganggur tidak memperoleh penghasilan. Hal ini akan menyebabkan tingkat kesejahteraan mereka akan menurun. Jika hal ini terjadi maka akan menyebabkan berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan meningkatnya angkatan kriminalitas yang mengganggu perekonomian suatu daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Potensi sumber daya manusia di NTB terdiri dari penduduk dan angkatan kerja.
2. Jumlah penduduk NTB tahun 2017-2019 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
3. Jumlah penduduk usia kerja di NTB tahun 2017-2019 bersifat fluktuatif dan mengalami peningkatan pada tahun 2019.
4. Jumlah angkatan kerja lebih besar dari jumlah bukan angkatan kerja.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disarankan:

1. Meningkatkan jumlah cadangan kapital agar dapat membiayai peningkatan jumlah penduduk.
2. Meningkatkan keterampilan managerial organisasi dan administrasi agar dapat mengelola peningkatan jumlah penduduk dan tenaga kerja.
3. Meningkatkan jumlah tingkat upah riil perkapita yang maksimum bagi tenaga kerja

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adi Oetomo. Sri Moertiningsih dan Omas Bulan Samosir (2010). Dasar-dasar Demografi. Salemba Empat Jakarta.
- [2] Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB (2015). Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat 2010-2020.
- [3] Anonim, (2019). Keadaan Ketenagakerjaan NTB Agustus 2019.
- [4] Budyarti, Ida (2006). Ekonomi Sumber Daya Manusia. Penerbit Unviersitas Lampung Bandar Lampung.
- [5] Irawan dan Suparmoko M (2008). Ekonomi Pembangunan. Edisi ke Enam Belas. BPFE UGM Jogjakarta.
- [6] Jhingan. M. L (2010). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Edisi ke Enam Belas. Rajawali Pers Jakarta.
- [7] Mantaw. W. Gregory (2006). Makro Ekonomi. Jakarta Airlangga.
- [8] Mantra, Ida Bagus (2000). Demografi Umum. Jogjakarta Pustaka Pelajar.
- [9] Muliadi S (2003). Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan. Jakarta PT Gravindo Persada.
- [10] Rosyetti (2009). Studi Keterkaitan Pertumbuhan Pendudukan Dengan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Kuantan Singingi (Jurnal Ekonomi Kependudukan 2009)
- [11] Simanjuntak, Payaman J (2001). Pengantar Sumber Daya Manusia. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI Jakarta.
- [12] Sugiono (2012). Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R & D Bandung Alfabeta.
- [13] Syhadah. Nillatus (2014). Analisis Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Penyerapan Angkatan Kerja (Jurnal Ekonomi Kependudukan Volume 2 Nomor 1 2014).
- [14] Syamsuddin (2015). Analisis Pengaruh Faktor Kependudukan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi (Jurnal Paradigma Ekonomi K Volume 1 Nomor 7 2015).



-
- [15] Tjipto Herijanto, Prijanto (2010). Menuju Pembangunan Berwawasan Kependudukan. Jurnal Populasi Jogjakarta UGM.
- [16] Tambunan. Tulus (2003). Perekonomian Indonesia. Ghalia Indonesia Jakarta.
- [17] [Http://sukasukadoong.blogspot.com/2015/01/peran-dan-fungsi-sumber-daya-manusia.html?m=1](http://sukasukadoong.blogspot.com/2015/01/peran-dan-fungsi-sumber-daya-manusia.html?m=1)



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN